REKONFIRMASI IDENTITAS NYAI DI PESANTREN

Oleh:

Syarifatul Marwiyah

Dosen STAI Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember

syarifahmarwiyah@yahoo.com

ABSTRACT

In general, Kyai is essential element of Islamic Boarding School while the wife is not a leader. In contrast, the leader of Pondok Pesantren Darus Sholah Tegal Besar Kaliwates Jember is Nyai Rosyidah. Although Nyai Rosyidah is the owner, called pengasuh, the chief of organization, KH. Nadzir Muhammad, has the great authority. The study discussed the leadership reconfirmation of Nyai in Pesantren concerning the research problems: First, how is the role of woman leadership in Islamic Boarding School? Second, what is the status of Nyai Rosyidah as the leader in public view and stakeholder of Pondok Pesantren Darus Sholah Tegal Besar Kaliwates Jember? The result of the study showed that Nyai / women has chance to lead Islamic Boarding School. However, the leadership is not absolute because people believe that Kyai is the leader of Pesantren. The status of Nyai Rosyidah as a leader can be categorized into three group including a group that accepted her as a leader, a group that did not accept her as leader, and a group that accepted her but wanted a man leadership.

Keywords: *Reconfirmation, Nyai Leadership, Pesantren (Islamic Boarding School)*

PENDAHULUAN

Islam tidak mengenal konsep superioritas manusia yang berdasarkan ras, suku, bahasa, dan sejenisnya. Tidak ada nilai lebih tertentu dari setiap bangsa yang bisa menaikkan hasrat dan martabatnya di dalam Islam. Di hadapan Allah semua sama dan tidak ada yang diunggulkan dibanding yang lain. Bagi-Nya yang paling menempati peringkat dalam struktur piramida

kebaikan adalah orang-orang yang paling baik taqwanya. Jadi, di luar yang paling intensif dalam memanifestasikan ketaqwaan, tidak akan masuk kualifikasi hitungan di mata Allah.¹

Dalam aras ini ada realitas kehidupan kaum perempuan yang entah sejak kapan sampai hari ini masih berada di sudut-sudut dan pinggir-pinggir sosial. Mereka dalam realitas ini juga masih dipandang sebagai makhluk Tuhan kelas dua, separuh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan seringkali diperlakukan, dengan bahasa yang mungkin agak kasar, setengah budak. Hak-hak mereka lalu dibatasi pada wilayah-wilayah kehidupan yang sangat eksklusif dan marjinal, rumah tangga. Perspektif ini terjadi dalam hampir seluruh bangunan kehidupan: sosial-politik-ekonomi dan lain-lain. Tegasnya, hidup dan mati kaum perempuan seakan-akan ditentukan oleh orang lain. Dan orang lain itu adalah makhluk yang lebih mengunggulkan dan menghebatkan laki-laki. Boleh laki-laki, tetapi boleh juga perempuan sendiri. Inilah yang oleh banyak orang disebut dengan kebudayaan patriarki.²

Menguraikan soal kemitraan laki-laki dan perempuan dengan merujuk sumber ajaran, dapat menimbulkan beda pendapat, apalagi memahami teks-teks keagamaan, bahkan teks apapun, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, budaya serta kondisi sosial masyarakat. Ini belum lagi yang diakibatkan oleh kesalahfahaman memahami latar belakang teks dan sifat dari bahasannya.³

Pesantren sedikitnya banyak turut serta menyumbangkan pemahaman teks-teks agama kepada masyarakat. Dan untuk mengukur apakah pesantren menjadi bagian dari lembaga yang melanggengkan ketidakadilan perempuan atau justru sebagai lembaga yang memperjuangkan nasib perempuan. Ada kriteria dasar yang dijadikan landasan untuk melihat pendidikan berkeadilan gender di pesantren: Pertama, bahwa dalam segala aktivitas pendidikan harus menempatkan santri sebagai subjek bukan objek. Artinya

¹ Irfan Hielmy, *Pesan moral dari pesantren*, Bandung : Penerbit Nusantara, 1999, 77

² Husein Muhammad, sebuah pengantar dalam Amiruddin Arani (ed), *"Tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan"*, Jakarta : Rahima, The Ford Foundation dan LKiS, 2002, xi

³ Quraish Shihab, Sebuah pengantar dalam Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-quran, ibid*, xxvii.

bahwa setiap santri dipandang sebagai individu yang utuh yang memiliki potensi dan kreasi yang berkembang dan kewajiban pendidikan adalah mengarahkan dan memajukan potensi itu. Berbeda halnya ketika santri dipahami sebagai objek, dianggap sebagai suatu yang harus diisi sesuai dengan keinginan pendidik, tanpa memperhatikan potensi para santri.

Kedua, Pendidikan harus menanamkan sikap kritis di kalangan para santri. Sikap kritis yang dimaksud adalah para santri mampu memecahkan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Agar para santri memiliki kemampuan mengatasi setiap permasalahan, maka santri harus memiliki kemampuan, mengenal dirinya sendiri, mengenal lingkungannya, mampu berfikir rasional, memiliki kecakapan akademik dan skill.

Ketiga, bahwa ada penyadaran keadilan gender dalam setiap aktivitas pendidikan di pesantren. Dalam setiap aktivitas pendidikan harus menempatkan laki-laki dan perempuan sejajar di satu sisi. Dan sisi lain bahwa perlu ada proses pemberdayaan pada perempuan dan memasukkan berbagai materi pelajaran yang meningkatkan kesadaran kesetaraan gender dan merevisi segala materi-materi pelajaran yang cenderung memposisikan perempuan secara tidak adil.⁴

Di dalam pesantren, kiai sebagai pimpinannya memiliki karisma karena pengetahuan dan ilmu agamanya. Nyai (istri Kiai) yang juga memimpin pesantren perempuan, juga merupakan tokoh masyarakat yang dipandang solihah dan disegani. Sekalipun demikian, masih terdapat anggapan di masyarakat luas bahwa keberhasilan Nyai memimpin pesantren karena pengaruh peran Kiai sebagai suaminya, sehingga keberadaan Nyai sebagai pemimpin pesantren perempuan karena suaminya, bukan karena kemampuannya tetapi masih dikaitkan oleh sesuatu yang dalam kasus ini adalah suaminya yang berstatus Kiai di pesantrennya.

Pondok Pesantren Darus Sholah merupakan salah satu pondok pesantren modern yang berlokasi di desa Tegal Besar Kaliwates Jember. Pondok pesantren ini di bangun oleh Alm. K.H. Yusuf Muhammad, LML (Gus Yus) dan Nyai Rosyidah pada tahun 1985. Sejak pertama dibangun, pondok pesantren ini bercorak pondok pesantren modern. Gus Yus selaku pemimpin pondok pesantren ini dalam mengelola pesantren dibantu oleh

⁴ *Ibid*

Nyai Rosyidah, pengurus yayasan serta guru-guru.

Sebuah kenyataan pahit, Gus Yus meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat saat Mukhtar ke-40 di Solo tahun 2005 duka ini semakin mendalam saat mengetahui Gus Yus muda ini belum memiliki keturunan yang akan menggantikan beliau dalam posisi pemimpin pondok pesantren, sebab putra beliau masih kecil dan itu pun hanyalah anak angkat beliau. Melihat situasi ini dengan mengingat akar sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darus Sholah, yang berhak memimpin pondok pesantren ini adalah Nyai Rosyidah.

Terkait dengan fenomena di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang Nyai Rosyidah selaku perempuan yang menjadi pengganti pemimpin pondok pesantren dari sudut kesetaraan gender, bagaimana pandangan masyarakat serta stakeholder Pesantren Darus Sholah dengan kepemimpinan perempuan. Langkah apa saja yang dilakukan Nyai Rosyidah dalam kepemimpinan pesantrennya serta apa saja factor pendukung dan penghambat kepemimpinan pesantren beliau di lingkungan pondok pesantren Darus Sholah Tegal Besar Kaliwates Jember.

Perempuan Dalam Wilayah Kepemimpinan Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, yang penyelenggaraan pendidikannya secara umum dengan cara non-klasikal, yaitu seorang Kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama' Arab abad pertengahan. Para santri biasanya tinggal dalam pondok (asrama) dalam pesantren tersebut. Kyai sebagai seorang ahli agama Islam, mengajarkan ilmunya kepada santri dan biasanya sekaligus pemimpin dan pemilik pesantren tersebut. Pesantren dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan atau pengguna jasanya. Untuk dapat melakukan hal tersebut dengan baik perlu didukung sistem manajemen yang baik.

Pemimpin adalah seseorang atau individu yang diberi status berdasarkan pemilihan, keturunan atau cara-cara yang lain, sehingga memiliki otoritas dan kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan sekumpulan orang melalui intitusi atau

organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.⁵ Sudarwan Danim mendefinisikan kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

Untuk mengetahui apakah pesantren memiliki komitmen memperjuangkan keadilan gender, awal mula bisa dilihat dari peran-peran orang intern pesantren sendiri, yaitu Kyai dan Nyai (sebutan untuk istri Kyai), ulama pesantren perempuan. Kyai atau Nyai dalam pandangan masyarakat Indonesia (Jawa) seorang ulama' yang mendirikan atau mengelola lembaga pesantren. Dalam masyarakat Jawa, ada dua kategori Nyai yaitu (1) perempuan yang mempunyai kemampuan di bidang agama dan melakukan kegiatan dakwah agama, (2) istri Kyai, baik yang melakukan dakwah maupun yang tidak melakukan dakwah.⁷

Nyai tidak berbeda dengan perempuan-perempuan lainnya, mempunyai peran yang cukup penting yaitu sebagai istri, bersama-sama suami membina keluarga melalui tatanan nilai baik yang bersumber dari pranata masyarakat pada umumnya maupun dari sumber ajaran agama, sebagai pendidik anak, sebagai pengendali rumah tangga dan berperan sosial atau peran komunitas yaitu melakukan aktivitas di luar keluarganya, di rumah tangganya seperti yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan dan sebagainya.

Keterlibatan Nyai dalam ruang domestic pesantren ataupun public masih dalam bayang-bayang kebesaran nama Kyai, karna itu tidak bisa lepas dari realitas kultur masyarakat yang nampak-nya lebih mempercayakan kepemimpinan agama, yang dalam pembahasan kali ini terdominan dalam masyarakat pesantren. Oleh sebab itu, maka masalah kepemimpinan perempuan dalam tulisan ini, akan diuraikan dari sudut pandang akar filsafat budaya jawa dan sudut pandangan agama.

⁵ Nur Syam dalam A. Halim (eds), *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit LKIS), 2005, 77

⁶ Sudarwan Danim, "*Kepemimpinan Pendidikan*", Bandung : Alfabeta, 2010, 6

⁷ *Ibid* hlm. 32

1. Kepemimpinan Perempuan Dalam Filsafat Jawa

Kepemimpinan dalam filsafat Jawa memiliki makna yang cukup dalam. Kepemimpinan memiliki seperangkat prasyarat yang harus ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh kedudukan sebagai pemimpin. Seorang pemimpin akan dikaitkan dengan kehendak yang di atas, berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Disamping itu, persoalan kepemimpinan adalah persoalan keturunan, sangat sulit jadi pemimpin kalau tidak memiliki golongan darah biru (ningrat). Dalam filsafat Jawa bahwa kepemimpinan lebih banyak disimbolkan oleh idiomatik ratu. Ratu itu harus punya tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya.

Istilah berasal dari kata *rat*, yang berarti bumi. Tempat tinggalnya disebut keraton.⁸ Kemudian kata *atu* biasanya diartikan sebagai penguasa kerajaan bisnis kelamin perempuan, penguasa kerajaan laki-laki disebut raja. Namun dalam filsafat Jawa predikat Ratu bukan menunjukkan kepada kepemimpinan berjenis kelamin perempuan yang didasarkan gender. Pengertian ratu di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan mutlak.

Sebagai pelaku kekuasaan peranan perempuan dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia cukup besar. Tidak sedikit para perempuan berkuasa secara baik dalam mengurus urusan kekuasaan. Namun demikian, kepemimpinan perempuan dalam sejarah Indonesia tidak mudah. Menurut Taufik Abdullah⁹ permasalahan kaum perempuan sangat kompleks. Berbagai kendala dalam masalah gender, persepsi kultural, tetapi menurut Taufik Abdullah tidak bisa dibantah bila belakangan kesuksesan laki-laki terdapat minimal perempuan.

Dalam falsafah Jawa sendiri, bahwa keberadaan pemimpin perempuan sangat diakui, hanya saja persyaratan untuk menjadi raja sangat dipengaruhi oleh falsafat Hindu Jawa. Harus keturunan ningrat dan dapat wahyu. Namun bila dilihat dari akar bahasa Ratu diibaratkan sebagai kepemimpinan yang bersosok perempuan, dengan segala kelebihan sifat feminimnya. Lalu

⁸ Gunawan Sumo Diningrat, *Yang Menanam Yang Memetik dalam B. Wiwoho (dkk), kajian tentang filsafat kepemimpinan dan sastra Jawa*, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1997, hlm. 47. Dikutip oleh Faiqoh, *Op. Cit*, hlm 19.

⁹ Taufik Abdullah, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Sejarah*, dalam jurnal sejarah nomor 5 edisi Juli 1995. Dikutip oleh Faiqoh, *Ibid*, hlm. 110

sejak kapan perempuan Jawa berurusan dan diposisikan mengurus rumah tangga (domestik).

Madelon Djajadiningrat mengembangkan suatu model sejarah kedudukan (*cultural historical model*) yang mampu menjelaskan perempuan Indonesia dalam konteks tertentu. Menurutnya, ideologi ibuisme yang berkembang pada akhir abad ke-20 merupakan kombinasi nilai-nilai kaum priyayi Jawa. Ideologi ibuisme ini menurut Djajadiningrat adalah ideologi yang memberikan imbalan kepada setiap tindakan yang dilakukan oleh ibu atas perempuan yang mengurus keluarga, kelompok, usaha atau negara, asalkan tidak menuntut kekuasaan atau prestise apapun sebagai imbalan.

Tradisi Jawa yang tercipta seperti itu, memberikan gambaran akan kedudukan perempuan di masyarakat Jawa. Dalam masyarakat Jawa perempuan tidak menjadi dirinya sendiri tetapi hanya sebagai pelengkap kaum suami. Perempuan diposisikan nomor dua. Akan tetapi, tradisi ini tidak memiliki akar kuat sejarah budaya Jawa, kalau dilihat bagaimana filsafat Jawa menempatkan perempuan. Dalam filsafat Jawa yang berangkat dari akar sejarah kejayaan kerajaan Jawa, ketika dipimpin oleh perempuan menunjukkan bahwa perempuan sangat menentukan untuk terlibat dalam kehidupan publik, sosial, bahkan mampu merekayasa sedemikian rupa untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.

2. Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan sebagai konsekuensi dari demokratisasi dan globalisasi masih merupakan perdebatan para pemikir keagamaan. Saat ini hampir lima ratus juta perempuan hidup di negara muslim. Mereka hidup di berbagai kawasan dengan budaya dan kondisi politik yang berbeda. Sebagian besar dari mereka hidup dalam era modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰ Tetapi tidak banyak dari mereka yang benar-benar menikmati kehidupan tanpa adanya tuntunan tradisi (keagamaan) lama yang tetap dipegang oleh para pemuka agama.

¹⁰ Mahanz af Khami, *Womens Human Right, in Mosime World*, Syracus : Syracus University, 1995. Dikutip oleh Faiqoh, 114.

Abdul Munim Sayid Hasan¹¹ berpendapat bahwa seseorang perempuan dilarang menjadi seorang imam dalam dengan alasan. Pertama, karena adanya ayat-ayat yang menyatakan bahwa kepemimpinan atas perempuan adalah milik kaum laki-laki. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. " (QS. An-Nisa' : 34)¹²

Ayat ini mengandung unsur perintah yang disebutkan dalam bentuk kalimat berita. Ayat ini berlaku umum mencakup kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Dengan demikian, tidaklah sah secara akal maupun *naql* seseorang laki-laki yang telah diberi tugas sebagai seorang pemimpin untuk mengurus segala macam urusan di dalam rumah kemudian dia memberikan kepemimpinan itu kepada istrinya untuk memikul beban secara umum. Pengharaman memegang kepemimpinan dan cabang-cabangnya bagi perempuan ini akan lebih jelas ketika mengambil kesimpulan dari Sabda Rasulullah hadits riwayat Ahmad, Al-Bukhori, At-Turmudzi, An-Nasa'i dari Abu Bakrah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : "Tidaklah akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan".¹³

Kedua, hukum kesaksian wanita yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Diantaranya kewajiban memberikan kesaksian adalah adanya seorang laki-laki dan dua orang perempuan apabila tidak terdapat dua orang perempuan dalam memberikan kesaksian. Alasan adanya persyaratan dua orang perempuan dalam memberikan kesaksian adalah karena keadaan seorang perempuan yang cenderung lupa sehingga membutuhkan kepada orang yang mengingatkan. Maka inilah yang dapat difahami dari firman Allah :

¹¹Abdul Munim Sayid Hasan, *Memahami Karakter Wanita*, Terjemah Tim Mutaqin, Jakarta : Mustaqin, 2005, 189.

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, "Al-Hikmah", 84

¹³ Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Hasan Al-Hanbali, *Ahkamul Sulthaniyah*. Dikutip oleh Abdul Munim Sayid Hasan, 189

... وَأَشْتَشْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ □ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا أَلَّا تَحْزَىٰ ... ٢٨٢

Artinya : “... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...” (QS. Al-Baqarah : 282)¹⁴

Berbeda dengan pendapat Abdul Mun'im. Beberapa tokoh-tokoh Islam Indonesia seperti Said Agil Al-Munawar, Quraish Shihab, Husen Muhammad, Said Aqil Siradj, Zaitunah Subhan dan beberapa tokoh-tokoh Islam Indonesia mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Menurut Said Agil Al-Munawar persoalan kepemimpinan perempuan ini masih berada di dalam wilayah yang diperselisihkan. Artinya, tidak satu pun dalil agama yang secara pasti menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin Negara. Dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa “Laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan” (arrijalu qawwamuna ‘ala an-nisa, An-Nisa’ : 34), ternyata menurut kalangan ahli tafsir menyatakan bahwa kepemimpinan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa ayat 34 adalah kepemimpinan laki-laki dalam lingkup keluarga. Hal ini diperkuat oleh lanjutan ayat tersebut, yaitu “bima fadlalallahu ba'dluhum ‘ala ba'dl wa bima anfaqu”, artinya karena Allah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian (perempuan) yang lain dan karena laki-laki memberi nafkah. Melihat penggalan ayat ini setidaknya ada dua alasan mengapa terjadi kepemimpinan laki-laki, pertama, karena laki-laki pada masa itu memiliki akses yang lebih kepada dunia publik dibandingkan kaum perempuan. Kedua, karena laki-laki menafkahi. Penafkahan dan kelebihan akses ini sangat bersifat sosiologis dan historis, tidak normatif. Artinya, kalau kondisi sosiologis dan historisnya berubah yang menyebabkan perempuan memiliki kemampuan memberi nafkah dan juga memiliki kelebihan akses di bidang publik, maka kepemimpinan perempuan bisa terjadi tidak hanya pada lingkup keluarga

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, “Al-Hikmah”, 48

akan tetapi lingkup yang lebih umum seperti Negara. Dan pada masa sekarang, hal itu sudah mulai terlihat. Perlu diketahui bahwa dilihat dari struktur kalimatnya, Surat An-Nisa' ayat 34 ini berbentuk "kalam khabar" (pemberitahuan). Maka salah sekali apabila sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai kekuatan untuk mengikat sebuah keharusan bahwa seorang pemimpin keluarga dan negara wajib tidak seorang perempuan. Dengan demikian dalam perspektif Al-Qur'an seorang pemimpin negara boleh saja dijabat oleh seorang yang berkelamin perempuan.

Muhammad Abduh juga pernah mengemukakan bahwa QS. An-Nisa' ayat 34 itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan bahwa kepemimpinan mutlak berada di tangan laki-laki.¹⁵ Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk mengerjakan amal-amal saleh dalam berbagai segi kehidupan. Mereka pun akan mendapatkan hasil atau balasan yang sama. Dari ayat tersebut tampak dengan jelas bahwa Islam memiliki konsep keadilan gender dan tidak mengenal diskriminasi. Hal senada dikatakan oleh Quraish Shihab, bahwa perempuan memiliki hak di bidang politik, seperti terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 71. dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik.¹⁶

Zaitunah Subhan¹⁷ dalam karangannya yang berjudul Tafsir Kebencian mengungkapkan bahwa ungkapan "*Qowwam*" muncul pada tiga ayat 34 dan 35 serta surat Al-Maidah ayat 8. Dalam tafsir Indonesia kata *Qowwam* di dua ayat yang lain (Surat An-Nisa' ayat 135 dan Al-Maidah ayat 8) tidak diterjemahkan dengan pemimpin, tetapi berdiri karena Allah. Mengapa pada ayat yang berkaitan dengan wanita menjadi berbeda yakni bermakna pemimpin. Menurut Zaitunah ayat ini bukan sebagai pernyataan normatif, tapi pernyataan kontekstual. Al-Qur'an hanya mengatakan bahwa

¹⁵ Tafsir Al-Manar Juz V, hlm. 68 dikutip oleh Sri Suhadjati Sukri, *Perempuan Sebagai Kepala Negara dalam Sri Suhadjati Sukri (ed), Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Yogyakarta : Gama Media, 2002, 120

¹⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1992, hlm 273. Dikutip oleh Sri Suhadjati, 120.

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta : LKIS, 1999, 105

pria adalah *qanwam* (menurut gramatika Arab : susunan kalimat *muftada khabar*) dan tidak mengatakan bahwa mereka (kaum pria) harus menjadi *qanwam*. Bila susunan Al-Qur'an itu demikian maka ayat ini merupakan sebuah pernyataan normatif wanita pada semua masa dan dalam semua keadaan.

Dalam artikel yang berjudul "Membongkar Hadis-hadis Bias Gender, Quraish Shihab¹⁸ mengungkapkan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan menurut hadis juga memiliki nuansa yang senada dengan kepemimpinan perempuan menurut tafsir Al-Qur'an. Artinya, hadis yang biasanya digunakan untuk menjustifikasi ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin yakni :

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكره قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Artinya: *"Usamah bin Haitsam menceritakan kepada kami : 'Auf menceritakan kepada kami dari Hasan (Al-Basri) dari Abu Bakrah. Kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW, ketika aku hampir saja ikut terlibat dalam peristiwa Perang Jamal (unta). Yaitu ketika anak perempuan Kisra sebagai penguasaan (raja/ratu) mereka. (Pada saat itu) Nabi mengatakan : Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan".*

Ternyata masih menyimpan tanda tanya besar. *Pertama*, dilihat dari sudut kualitasnya, hadis tersebut menurut para ahli hadis, termasuk dalam kategori hadis ahad. Menurut mereka, kategori ini tidak memiliki faedah yang pasti (qath'iy) sebagai dasar dalam menentukan sebuah keputusan hukum. Karena hadis tersebut masih bersifat persengketaan (zhanny), maka sebagaimana dinyatakan oleh Quraish Shihab, hadis ini sangat memungkinkan untuk ditafsirkan kembali bahkan ditolak keberlakuannya. *Kedua*, apabila ditilik dari segi historitas (asbabul wurud) nya, ternyata hadis ini

¹⁸ Quraish Shihab, *Membongkar Hadis-hadis Bias Gender*. Dalam Syafiq Hasyim (ed), 23.

merupakan respon atas dilantiknya seorang putri Kirsa di Persia yang dianggap Nabi tidak memiliki kemampuan untuk memimpin pemerintahan. Penolakan Nabi ini juga tidak didasarkan karena dia seorang perempuan, akan tetapi lebih didasarkan kepada ketidakcakapan putri tersebut dalam memegang kendali pemerintahan. Sangat mungkin apabila perempuan yang memimpin tadi bukan putri Kirsa Persia, mungkin Nabi tidak akan mengeluarkan hadis tersebut. Dengan dua hal ini sebenarnya kita sudah punya alasan untuk tidak mempergunakan hadits tersebut sebagai alat pembunuh hak kepemimpinan kaum perempuan. Dengan demikian dalam perspektif hadis kepemimpinan perempuan sama sekali tidak dilarang, bahkan sebaliknya masih banyak hadis-hadis lain yang kualitasnya lebih tinggi justru mendukung kepemimpinan perempuan.

Menurut Zaitunah¹⁹, kalaulah hadis tersebut bisa diangkat, tentu berbagai pertanyaan akan muncul : bukankah banyak contoh keberhasilan kepemimpinan wanita ? Apakah sebuah hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dapat diterima ? Menurut ilmu mustalah hadis bahwa sebuah hadis tidak dapat diterima jika : 1) menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin dipercaya. 2) bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, dan 3) bertentangan dengan fakta sejarah.

Hadis di atas bertentangan dengan Al-Qur'an dan fakta sejarah (Ratu Saba' di negara Yaman Selatan). Bahkan sangat mungkin hadis tersebut tidak ada sebelum perang Unta (Aisyah istri Nabi sebagai pimpinan perang mengendarai unta) yang melibatkan banyak sahabat terkemuka di dalamnya dan tidak seorang pun keberatan atas kepemimpinan Aisyah, juga tidak membelot dengan alasan tersebut, termasuk periwayat hadis di atas (Abu Bakrah). Sementara masalah ini adalah masalah politik, tentu diserahkan kepada kondisi setempat.

Husain Muhammad menambahkan bahwa dalam tatanan Fiqih untuk persoalan-persoalan menyangkut kemasayarakatan dan politik yang lebih diutamakan adalah faktor kemaslahatan yakni urusan politik yang sesuai dengan syara', kaidah yang digunakan adalah :

لا سِيَاسَةَ إِلا مِنْ وَفْقَ الشَّرْعِ

¹⁹ Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, 113

Artinya: *(Dalam urusan politik yang paling menentukan adalah kesesuaiannya dengan syara')*

Dalam kaidah fiqih lain menyatakan dengan jelas mengenai hal ini "*tasharruf al-imam 'ala ar-ra'yyha manuthun bi al-mashlahah*" (tindakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan mereka). Kemaslahatan dalam kekuasaan umum / publik antara lain dapat ditegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi semakin jelas dan kuat bahwa kepemimpinan publik tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan jenis kelamin, melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual, dan moral serta sistem politik yang mendukungnya.²⁰

Isu gender merupakan wacana yang baru di dunia pesantren. Isu ini mengundang resisten dan kontroversi karena dipandang sebagai unsur yang datang dari barat dan tidak berakar dari tradisi pesantren. Isu gender masuk dalam komunitas pesantren, diakui atau tidak, didorong oleh sensitivitas gender yang muncul sebagai sikap kritik atas berbagai bias kultural dalam tubuh pesantren. Rekonstruksi ini perlu dilakukan untuk membangun pemaknaan yang mengandung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Proses ini diharapkan dapat mengeliminasi ketimpangan gender yang saat ini masih terapkan dalam kehidupan sosial pesantren. Sebagai lembaga pendidikan agama, pesantren merupakan basis proses rekonstruksi kebudayaan yang bersumber dari pemaknaan teologis atau realitas sosial aktual.

Nyai dan terutama sekali Kyai adalah tokoh-tokoh sentral di pesantren. Selain sebagai pimpinan, mereka adalah guru, teladan, dan sumber nasihat bagi para santri. Mereka memiliki peran yang substansial dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran agama di pesantren. Hubungan antara Kyai, Nyai dan santri diikat oleh emosi keagamaan sedemikian rupa sehingga setiap pandangan dan pendapat Kyai dan Nyai adalah pegangan bagi para santrinya. Hubungan emosional keagamaan inilah yang membuat peran dan fungsi Kyai dan Nyai menjadi sangat kuat dalam mensosialisasi-

²⁰ Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKIS, 2001, 152

kan nilai-nilai baru pada para santri.²¹

Akan tetapi walaupun keberadaan Nyai dalam pesantren termasuk figure yang penting, karna peran Nyai yang bertanggung jawab dan aktif berpartisipasi dalam bidang menegemen, pendidikan, keuangan serta aktif berpartisipasi dalam pengembangan dan tanggung jawab social lembaga pesantren. Namun keterlibatan Nyai itu lebih sebagai pemain belakang yang sangat menentukan perjuangan social seorang Kyai. Lebih tepatnya keberadaan Nyai masih dalam bayang-bayang Kyai dan disinilah kompleksitas gender.

Kedudukan Dan Peran Nyai Rosidah Dalam Kepemimpinan Pesantren

Pondok pesantren pada umumnya menjadikan Kyai sebagai sentral utama, bahkan pendirinya, sehingga pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung kepada kemampuan pribadi Kyai.²² Sedangkan bagi pondok pesantren yang bercorak modern pendidikan pesantren tidak cukup didukung sistem madrasah, melainkan juga sekolah-sekolah umum (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas atau jenjang Perguruan Tinggi umum).

Pondok pesantren Darus Sholah adalah institusi lembaga yang berbentuk yayasan, dengan Gus Yus sendiri sebagai ketua yayasan dan saudara dan kerabat lain dari keturunan Kyai Siddiq pada posisi kepengurusan di bawahnya. Walaupun demikian distribusi peran kekuasaan lebih dominan Gus Yus daripada kerabatnya. Hal ini dapat terlihat dari pola fisik pondok pesantren Darus Sholah yang terdiri dari Masjid, rumah Kyai, pondok, madrasah, tempat ketrampilan, dan gedung perkantoran.²³ Rumah Kyai yang berada di tengah area pesantren menjadikan Kyai memiliki kekuasaan yang dominan atas pesantren. namun demikian, Gus Yus dalam kesehariannya dibantu oleh Nyai Rosyidah dalam hal pekerjaan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup pesantren, baik pesantren putra maupun pesantren putrinya. Sementara kerabat Gus Yus yang rumahnya jauh dari lo-

²¹ Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren : Studi Kasus Kyai atas Wacana Perempuan*, Yogyakarta : LKIS, 2010, 7

²² Imron Arifin, M. Slamet, 13

²³ Sudjoko Prasojo, *Profil Pesantren*, laporan hasil penelitian Al-Falak dan delapan pesantren lain di Bogor. Jakarta : LP3ES hlm. 89-90. Dikutip oleh Sukamto, *Ibid*, hlm. 3

kasi pondok pesantren Darus Sholah, dominan kekuasaannya tidak sebesar Gus Yus dan Nyai Rosyidah. Peran besar Nyai Rosyidah selaku istri pengasuh dapat dibuktikan dengan tetapnya beliau di kediaman untuk memenej pesantrennya walau Gus Yus berada di Jakarta menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia selama 2 periode (1999-2004 dan 2004-2009)

Pada saat musibah kecelakaan yang dialami oleh Gus Yus di Solo tahun 2004, Gus Yus meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat tentang pemimpin penggantinya. Menurut Zamarkhasyi Dhofier, sarana para Kyai dalam melestarikan tradisi pesantren ialah membangun solidaritas dan kerjasama antara sesama mereka. Diantara solidaritas dan kerjasama tersebut ialah :

- a. Mengembangkan tradisi bahwa keluarga terdekat menjadi calon kuat pengganti kepemimpinan pesantren.
- b. Mengembangkan suatu jaringan aliansi perkawinan endogami antara keluarga Kyai.
- c. Mengembangkan tradisi transmisi pengetahuan dan rantai transmisi intelektual antara sesama Kyai dan keluarganya.²⁴

Sedangkan menurut Sukamto, proses alih kepemimpinan di pondok pesantren biasanya adalah keturunan dari Kyai yang telah meninggal meskipun yang bersangkutan tidak atau kurang memiliki kemampuan.

Struktur masyarakat tradisional seperti pondok pesantren akhirnya memiliki gambaran kepemimpinan dengan gaya paternalistik, baik dalam fungsi kepemimpinan maupun dalam corak masyarakatnya. Masyarakat yang bercorak demikian disebabkan oleh faktor-faktor seperti kuatnya ikatan *primordial*, kehidupan masyarakat yang *komunalistik*, peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari, dan kokohnya hubungan pribadi yang intim antara anggota komunitas dengan komunitas lainnya, serta adanya *extended family system*.²⁵

Bertolak dari teori Sukamto, maka kepemimpinan Gus Yus seharusnya berpindah ke tangan keturunan beliau, akan tetapi realitanya Gus Yus tidak memiliki keturunan dari pernikahannya bersama Nyai Rosyidah, hanya saja

²⁴ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 62-63

²⁵ Sukamto, *Kepemimpinan Kyai*, 39

beliau mengangkat putra 2 orang laki-laki dari keluarga Nyai Rosyidah yang bernama Muhammad Zakki Audan dan Muhammad Cornel Aulawi. Karena struktur masyarakat Tegal Besar adalah masyarakat tradisional, maka kedua putra Gus Yus tidak berhak dengan kepemimpinan pesantren. Sebagian masyarakat Tegal Besar mengalihkan posisi kepemimpinan pada Nyai Rosyidah yang dianggap kapabel dengan kepemimpinan pesantren.

Sementara itu, berdasarkan teori Sukamto yang menyebutkan bahwa ketika lembaga berubah dalam bentuk yayasan, maka kepemimpinan di dalamnya adalah kepemimpinan rasional, sehingga ketika Gus Yus wafat, maka tugas beliau selaku Ketua Yayasan akan beralih pada orang yang tepat berada di bawahnya yakni KH. Nadzir Muhammad, kakak kandung Gus Yus, sehingga sebagian masyarakat mengakui Kyai Nadzir sebagai pengganti Gus Yus di posisi ketua yayasan sekaligus pengasuh Darus Sholah.

Fenomena di atas mengakibatkan legitimasi kepemimpinan pondok pesantren Darus Sholah dengan 2 pengasuh yakni KH. Nadzir Muhammad yang merangkap ketua yayasan dan Nyai Rosyidah yang dalam pengambilan kebijakan pesantren harus dengan sepengetahuan KH. Nadzir Muhammad.

Membicarakan bagaimana peran Nyai, sebelumnya kita akan menge-tengahkan apakah itu sebenarnya makna peran, menurut Suhardono, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu *pertama* penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu fungsi posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.²⁶

Peran dalam sosiologi dibahas ketika mengkaji struktur sosial. Dalam

²⁶ Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994, 3. Dikutip oleh Achmad Patoni, *Peran Kyai Dalam Partai Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, 40

struktur sosial, dikenal dua konsep penting yaitu status (*status*) dan peran (*role*). Adapun definisi yang dibuat oleh sosiolog Ralph Linton mengenai kedua konsep tersebut sebagai berikut. Status ialah “*a collection of right and duties*” (suatu kumpulan hak dan kewajiban), sedangkan peran ialah “*the dynamic aspect of status*” (aspek dinamis dari suatu status).²⁷ Definisi sederhana yang dibuat oleh Linton ini memberikan deskripsi mengenai posisi dan kedudukan dari status-peran. Menurut Linton, seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya.

Berdasarkan teori di atas maka peran Nyai Rosyidah menurut penjelasan historis berarti pengganti Kyai atau Gus Yus dalam masalah kepemimpinan di pondok pesantren Darus Sholah adalah Pengasuh pondok putra sekaligus pondok putri di sini, sebagai pengurus kalau ada apa-apa ya matur (lapor) kepada Nyai Rosyidah. Selaku pengasuh beliau mengurus seluruh permasalahan pondok. Ungkapan di atas dapat dibenarkan oleh keterangan lain yaitu, komunikasi pengurus putra ke Nyai juga sering. Nyai juga mengurus santri putra kalau ada kasus, hanya saja kalau ada acara penting harus ada pemberitahuan kepada Gus Nadzir yang jarang turun tangan sendiri untuk santri putra karena beliau juga punya santri sendiri yang letaknya agak jauh dari Darus Sholah.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa karakter yang disandang atau dibawakan oleh Nyai Rosyidah adalah pengasuh pondok pesantren putra dan putri, akan tetapi peran ini masih terikat dengan peran KH. Nadzir Muhammad selaku pengurus yayasan.

Peran pesantren sebagaimana teori dikemukakan adalah sebagai institusi keagamaan, institusi pendidikan, institusi kemasyarakatan, institusi kebudayaan, institusi pembinaan moral. Pesantren sebagai sebuah institusi tidak akan dapat menjalankan perannya, kecuali ada orang-orang yang menjalankan peran tersebut. Dan dalam teori Linton, pengertian peran menuntut ilmu sosial. Berarti fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.

Berdasarkan teori di atas maka peran Nyai dapat diklasifikasikan

²⁷ Ralph Linton, “Status and Role”, dalam Lewis Coser dan Bernard Rosenberg (ed), *Sociology Theory “A Book of Readings*, (New York : The Macmillan, 1997), 356.

sebagai berikut:

1. Peran Nyai dalam bidang keagamaan diantaranya adalah imam sholat, memberi tausiyah pada santri putri, mengkoordinir santri untuk sholat 5 waktu berjamaah, sholat tahajjud, sholat dhuha dan lain sebagainya.
2. Peran Nyai Dalam Pendidikan: Pengajaran al-Qur'an, Pengajaran kitab Kuning dan Menejer Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Formal.

Adapun sistem pendidikan yang berada di pondok pesantren Darus Sholah adalah sistem pendidikan yang mengadopsi kurikulum DIKNAS, DEPAG dan Pesantren dengan perimbangan proporsional. Pendidikan Diniyah di pondok ini melebur jadi satu dalam pendidikan formal. Jadi pondok ini tidak ada istilah sekolah formal dan sekolah diniyah, pembayaran SPP di Darus Sholah itu satu pintu. Jadi mereka membayar SPP di sekolah masing-masing dan di dalamnya sudah termasuk uang asrama, makan, dan lain-lain.

Dari paparan di atas, peran Nyai dalam pendidikan adalah menjadi kepala sekolah SD Plus Darus Sholah, selain itu beliau sebagai pengasuh Darus Sholah beliau mengontrol aktifitas pendidikan, keuangan serta kinerja guru, memberi petunjuk serta mengawasi apa, bagaimana, kapan dan dimana tugas dilakukan, memberi solusi bila ada permasalahan, mengawasi agenda sekolah, menerima laporan keuangan dari setiap lembaga di setiap bulannya, memberi semangat kepada santri yang akan mengikuti berbagai even perlombaan dan olimpiade.

Peran Nyai dalam kemasyarakatan dan kebudayaan diantaranya adalah membina pengajian ibu-ibu di kampung, Ketua Muslimat Ranting Tegal Besar, Khotmil Qur'an yang beliau pimpin sendiri.

1. Peran Nyai dalam pembinaan moral, adalah memberi nasehat kepada santri yang bermasalah, memberi ceramah kepada masyarakat sekitar waktu pengajian sekedar untuk mengingatkan.

Maka bisa dilihat bahwa teori *رئيس القوم خدمهم* itu benar-benar dipraktikkan oleh Nyai Rosyidah. Hal ini dikuatkan oleh ungkapan beliau : "Saya sebagai Khodimul Ma'had (pelayan pondok) harus bisa melayani semuanya dengan baik demi / untuk kemajuan Darus Sholah kedepan".²⁸ Dan sebagai pengasuh pesantren ada beberapa factor pendukung dan peng-

²⁸ Wawancara, Nyai Rosyidah, Tegal Besar, 2011.

hambat Nyai Rosidah dalam memimpin pesantren;

1. Faktor Pendukung: Basic keilmuan yang dimiliki Nyai Rosyidah baik ilmu agama dan pendidikan sehingga mampu memenejemen pesantren dengan baik dan partisipasi dari seluruh elemen pesantren yakni kepala sekolah, dewan guru, ustadz dan ustadzah serta pengurus yang saling bekerja sama untuk memajukan Darus Sholah disertai sarana dan prasarana yang menunjang.
2. Faktor Penghambat: hilangnya figur seorang suami yang mensupport Nyai ketika menghadapi masalah, serta status beliau sebagai perempuan yang cukup menyulitkan beliau menjangkau seluruh lapisan masyarakat karna ada sebagian masyarakat pesantren yang masih belum bisa menerima perempuan menjadi pemimpin pesantren

Legitimasi kepemimpinan Kyai secara langsung diperoleh dari masyarakat, berdasarkan keahlian ilmu agama, kewibawaan, sifat pribadi dan keturunan. Akan tetapi legitimasi kepemimpinan Nyai dipondok pesantren (perempuan) bukan karena kemampuannya tapi masih dikaitkan oleh suaminya yang berstatus Kyai di pesantrennya.²⁹ Dalam kasus Nyai Rosyidah sebagai pengasuh Darus Sholah sepeninggal Gus Yus maka anggapan masyarakat serta stakeholder pesantren bermacam-macam diantaranya adalah : tidak ada alasan menolak pemimpin perempuan dengan alasan keadilan gender dan Nyai merupakan pengganti Kyai yang sudah almarhum. Pemimpin perempuan itu sah asal memiliki kapabilitas sebagai pemimpin. Tidak ada masalah bagi pemimpin perempuan dengan alasan mampu memberikan masalah pada pondok pesantren Darus Sholah. Perempuan boleh saja menjadi pemimpin / pengasuh karena tidak ada yang bisa diandalkan dalam mengurus santri. Sedangkan Nyai lebih mengetahui seluk beluknya.

Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan kepemimpinan perempuan itu boleh saja selama tidak melanggar aturan. Apalagi kepemimpinan itu menjadi amanah dan mengharuskan Nyai menjadi pemimpin/pengasuh. Akan tetapi tetap saja pemimpin laki-laki dan perempuan berbeda hasilnya. Nyai butuh figur Kyai dalam mengelola pesantren. Maka sosok Nyai berhak memimpin hanya pada santri perempuan, sedangkan santri laki-laki kepemimpinannya diserahkan kepada Kyai Nazhir sebagai ketua yayasan.

²⁹ Faiqoh, *Nyai Agen*, 23

Paparan di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dan stakeholder pesantren memahami akan kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan punya kesamaan hak dalam masalah kepemimpinan walaupun masih ada yang menolak atau menerima tetapi tetap mengakui kesuperioritasan laki-laki.

PENUTUP

Kepemimpinan sentral dalam pesantren adalah Kyai dan Nyai. Posisi mereka selain sebagai pimpinan, mereka adalah guru, teladan, dan sumber nasihat bagi para santri dan juga masyarakat pesantren. Apapun yang menjadi pandangan serta pendapat Kyai dan Nyai adalah pegangan bagi para santrinya. Hubungan emosional keagamaan inilah yang membuat peran dan fungsi Kyai dan Nyai menjadi sangat kuat dalam mensosialisasikan nilai-nilai baru pada para santri. Akan tetapi walaupun keberadaan Nyai dalam pesantren termasuk figure yang penting, namun keterlibatan Nyai itu lebih sebagai pemain belakang yang sangat menentukan perjuangan social seorang Kyai. Lebih tepatnya keberada Nyai masih dalam bayang-bayang Kyai dan disinilah kompleksitas gender.

Sedangkan Kedudukan Nyai Rosyidah di Pondok Pesantren Darus Sholah adalah pengasuh pondok, walaupun status pengasuh ini berada di bawah kekuasaan ketua yayasan yakni KH. Nadzir Muhammad. Dan Kedudukan Nyai Rosyidah sebagai pemimpin perempuan menurut pandangan masyarakat dan stakeholder pesantren Darus Sholah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang menerima dan tidak memperlmasalahkan Nyai Rosyidah sebagai pemimpin perempuan. Kedua, kelompok orang yang tidak menerima Nyai Rosyidah sebagai pemimpin perempuan. Ketiga, kelompok yang menerima Nyai Rosyidah sebagai pemimpin perempuan akan tetapi masih mengunggulkan dominasi laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim Sudarwan, v2010 *"Kepemimpinan Pendidikan"*, Bandung : Alfabeta
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini., et al. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. McGill-ICIHEP and Pustaka pelajar.
- Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain. 2000. *Dunia Wanita Dalam Islam*, terj. Muhammad Abdul Qodir Alkaf. Jakarta: Lentera.
- Faiqoh. 2003. *Nyai Agen Perubahan Di Pesantren*. Jakarta Pusat: Kucica.
- Fakih, Mansour., et al. 1996. *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Gunawan Sumo Diningrat, 1997. *Yang Menanam Yang Memetik dalam B. Wiyoho (dkk), kajian tentang filsafat kepemimpinan dan sastra jawa*, Jakarta : Yayasan Bina Pembangunan
- Hasan, Hamka. 2009. *Tafsir Jender: Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia Dan Mesir*. Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI.
- Hasyim, Syafiq. ed. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. JPPR.
- Husein Muhammad, 2002. sebuah pengantar dalam Amiruddin Arani (ed), *"Tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan"*, Jakarta : Rahima, The Ford Foundation dan LKiS
- Irfan Hielmy, 1999. *Pesan moral dari pesantren*, Bandung : Penerbit Nusantara
- Mahanz af Khami, 1995. *Womens Human Right, in Mosime World*, Syracus : Syaracus University
- Marhumah Ema, 2010. *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren : Studi Kasus Kyai atas Wacana Perempuan*, Yogyakarta : Lkis
- Moghissi, Haideh. 2005. *Feminisme Dan Fundamentalisme Islam*, terj. M. Maufur. Yogyakarta: LkiS.
- Mufidah Ch. 2010. *Gender Di Pesantren Salaf, Why Not ? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender Di Kalangan Santri*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana*

Syarifatul Marwiyah

- Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Muhammad, Ibrahim Al-Jamal. *atau Fiqih Wanita*, terj. Anshori Umar. Semarang; C.V.As-Syifa.
- Nur Syam dalam A. Halim (eds), 2005.. *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren Kelompok Penerbit LkiS
- Patoni, Achmad. 2007. *Peran Kyai Pesantren Dalam Partai Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Prasojo Sudjoko, *Profil Pesantren*, laporan hasil penelitian Al-Falak dan delapan pesantren lain di Bogor. Jakarta : LP3ES
- Ralp Linton, "1997. Status and Role", dalam Lewis Coser dan Bernard Rosenberg (ed), *Sociology Theory " A Book of Readings*, New York : The Macmillan
- Ridha, Muhamad Rasyid. 1993. *atau Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, terj. Abd. Haris Rifa'ie & M. Nurhakim. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Sayyid Hasan, Abdul Mun'im. 2005. *atau Memahami Karakter Wanita*, terj. Tim Mustaqim. Jakarta: Mustaqim.
- Shihab Quraish, Sebuah pengantar dalam Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan gender perspektif Al-quran*, *ibid*, xxvii.
- Soemanto, Wasty., and Hendyat Soetopo. 1960. *Kepemimpinan Dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir kebencian: Studi Bias Gender Dalam Quran*. Yogyakarta: LkiS.
- Suhardono Edy,1994. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sukri, Sri Suhandjati. ed. 2002. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*.
- Taufik Abdulloh,1995. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Sejarah*, dalam jurnal sejarah nomor 5 edisi juli. Dikutip oleh Faiqoh Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.